

Membangun Kerangka Konseptual Aspek Penguat Daya Saing Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)

Rizka Mudyanti, Novi Trihutomo

Rizka Mudyanti, Novi Trihutomo; ¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-06-01

Received in revised form 2022-14-01

Accepted 2022-24-02

Kata kunci:

Daya Saing Daerah,
Kesejahteraan,
Pembangunan
Berkelanjutan.

Keywords:

Regional Competitiveness,
Welfare, Sustainable
Development.

How to cite item:

Rizka Mudyanti, Novi
Trihutomo. (2022).

Membangun Kerangka
Konseptual Aspek Penguat
Daya Saing Daerah (Studi
Kasus di Kabupaten
Jombang)
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 3(1).

Abstrak

Dalam konteks persaingan global, tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi daya saing daerah, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah dalam mencapai kualitas pembangunan yang berkelanjutan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Meski demikian, upaya untuk menguatkan daya saing daerah rata-rata sulit dilakukan daerah karena relatif kurangnya model kerangka konseptual dalam mengkonstruksi indikator daya saing daerah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi indikator daya saing daerah untuk menciptakan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan metode kualitatif yang diperkuat dengan kegiatan FGD, penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat aspek pembentuk daya saing daerah, yaitu: (i) aspek pasar; (ii) aspek SDM; (iii) aspek ekosistem inovasi; dan (iv) aspek penunjang. Penguatan keempat aspek tersebut berdasarkan masing-masing indikatornya dapat meningkatkan produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian daerah. Dengan pengukuran daya saing daerah dan dipadukan dengan keunggulan sumberdaya lokal, maka diharapkan positioning daerah dapat diketahui guna perbaikan pembangunan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat menajdirujukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong sinergi program antar sektor.

In the context of global competition, the level of competitiveness is one of the parameters used to realize sustainable development. The higher the regional competitiveness, the higher the level of community welfare. Regional competitiveness is the ability of the region to achieve sustainable quality development in order to achieve a high level of welfare while remaining open to domestic and international competition. However, efforts to strengthen regional competitiveness are, on average, difficult for the regions to carry out due to the relative lack of conceptual framework models in constructing indicators of regional competitiveness. Therefore, this study aims to construct indicators of regional competitiveness to create quality and sustainable development. Based on the qualitative method that was strengthened by FGD activities, this study found that there are four aspects that shape regional competitiveness, namely: (i) market aspects; (ii) HR aspects; (iii) aspects of the innovation ecosystem; and (iv) supporting aspects. Strengthening these four aspects based on their respective indicators can increase productivity, progress, competition, and regional independence. By measuring regional competitiveness and combining it with the advantages of local resources, it is hoped that the regional positioning can be known to improve development in the future. The results of this study can be used as a reference for local governments in making policies that are more targeted and encourage program synergies between sectors.

* Rizka Mudyanti, Novi Trihutomo.

© 2022 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam konteks persaingan global, tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu penekanan dari strategi daya saing adalah diperuntukan bagi pemerintah daerah. Dengan melihat dinamika pembangunan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan daya saing yang tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah (Sundgren, 2015). Peningkatan daya saing mempunyai posisi strategis sebagai bahan perumusan, penetapan, evaluasi, monitoring kebijakan, serta bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Landasan berfikirnya bahwa tingkat daya saing daerah merupakan salah satu kriteria untuk menentukan pencapaian sebuah tujuan bagi peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Urgensi penguatan daya saing daerah dalam konteks kebijakan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi serta input bagi perencanaan pembangunan (Rivero & Theodore, 2014).

Kabupaten Jombang adalah salah satu daerah yang sangat berkepentingan terhadap penguatan daya saing daerah. Pada tahun 2021-2022, penguatan daya saing daerah semakin dibutuhkan terutama dalam memformulasikan kebijakan pembangunan pasca terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini sangat penting agar ritme pembangunan yang mengalami perubahan secara drastis tetap selaras dengan arah kebijakan jangka panjang daerah yang menekankan pada daya saing daerah berbasis kekuatan sumberdaya lokal.

Dalam dokumen perencanaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, makna daya saing daerah adalah kemampuan dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Daerah dapat dikatakan berdaya saing jika dicirikan minimal dengan enam aspek, yaitu: (i) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; (ii) tingginya iklim investasi; (iii) ketersediaan infrastruktur yang berkualitas; (iv) terjaganya kelestarian lingkungan melalui model pembangunan berkelanjutan; (v) terwujudnya stabilitas sosial politik; dan (vi) tingginya kinerja kemampuan ekonomi daerah.

Dari kondisi faktual di atas, maka penguatan daya saing daerah sangat dibutuhkan dalam rangka mengevaluasi kebijakan untuk

mempercepat penyusunan prioritas program untuk meningkatkan kinerja indikator pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kinerja kemampuan ekonomi daerah. Hanya saja, upaya untuk mempercepat penguatan daya saing daerah secara umum masih relatif kurang optimal akibat minimnya kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam membangun indikator daya saing daerah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual aspek apa saja yang dapat dipakai untuk menyusun penguatan daya saing daerah.

Usulan kerangka konseptual aspek penguat daya saing daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi atau kekuatan daerah untuk menghadapi kelemahan dan tantangan pasar. Mayoritas daerah di Indonesia pada dasarnya mempunyai kekuatan yang relatif sangat beragam, diantaranya adalah potensi sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, infrastruktur, dan sumberdaya pemerintahan. Pengukuran dan analisa tersebut diharapkan mampu menghasilkan bahan evaluasi dan menetapkan langkah-langkah strategis bagi percepatan peningkatan daya saing daerah yang komprehensif, sehingga upaya untuk mewujudkan daerah yang berkarakter dan berdaya saing dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, pengukuran dan analisa yang dilakukan diharapkan mampu berkontribusi bagi kepentingan literatur terkait indikator apa saja yang mampu menguatkan teori daya saing daerah. Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

2. Teori *Leading Sector Approach*

Penyusunan dan analisa indikator penentu daya saing daerah tidak bisa dilepaskan dari teori regional, salah satunya adalah *leading sector approach*, yaitu sektor pengungkit sebagai bagian penting pembentuk daya saing regional (Yushkov, 2015). Hal ini dilandasi oleh pendekatan kewilayahan, dimana daya saing suatu daerah dilandasi oleh faktor *endowment* sebagai kekuatan internal pembentuk daya saing spasial. *Leading sector approach* merupakan sebuah konsep yang mendasari pembangunan ekonomi pada *multiplier effect* pembangunan *key sector* (unggulan) terhadap sektor-sektor yang lain. *Key sector* menjadi suatu obyek yang penting atau diutamakan untuk dibangun, yang kemudian

dari hasil pembangunan tersebut diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya (Thurlow *et al.*, 2018). Alasan dasar implementasi *leading sector* adalah adanya keterbatasan sumberdaya dan biaya pembangunan yang tersedia, disinilah kelebihan dari pada *leading sector approach*. Namun, selain memiliki kelebihan, konsep ini memiliki kelemahan yakni tidak dapat menjangkau sektor-sektor yang kapasitas pembangunannya rendah.

Konsep dasar pembentuk *leading sector approach* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (i) konsep basis ekonomi atau *economic base*; dan (ii) konsep pusat pertumbuhan atau *growth pole*. Pertama adalah konsep *economic base*, yaitu konsep yang menjadi rujukan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah. Model basis ekonomi merupakan salah satu alat untuk mendeteksi mengenai potensi basis ekonomi suatu daerah. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pada intinya, teori basis ekonomi merupakan teori multiplier regional yang berusaha menjelaskan perubahan-perubahan struktur ekonomi regional dengan menekankan hubungan antara struktur yang terdapat dalam perekonomian regional dan penambahan kekuatan-kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu sektor ke sektor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep *economic base* sangat berguna bagi peningkatan daya saing suatu daerah melalui pemetaan sektor basis sebagai salah satu kekuatan internal.

3. Konsep Daya Saing Daerah

Secara teoritis, konsep daya saing daerah diambil dari konsep daya saing perusahaan atau pelaku ekonomi (Chikan, 2008). Oleh karena itu, mengulas konsep daya saing daerah pada dasarnya sama dengan mengulas konsep daya saing perusahaan atau pelaku ekonomi. Dalam konteks perusahaan, daya saing dapat diartikan sebagai produktivitas nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Faktor sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi kekuatan bersaing dan menjadi input bagi strategi persaingan dengan mempengaruhi atau mengubah kekuatan sumberdaya tersebut agar dapat memberikan situasi yang menguntungkan (Habanik *et al.*, 2015). Sumberdaya yang dimaksud dapat

berupa kepemilikan permodalan, kapital, SDM, dan jaringan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam konteks demikian, maka daya saing merupakan strategi untuk mengelola sumberdaya perusahaan agar mampu memenangkan persaingan pasar.

Untuk kasus perusahaan, setidaknya terdapat lima aspek yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri, yaitu: (i) ancaman masuknya pendatang baru; (ii) kekuatan tawar menawar pemasok; (iii) kekuatan tawar menawar pembeli; (iv) ancaman produk substitusi; dan (v) persaingan dalam industri. Kelima aspek yang mempengaruhi persaingan mampu berdampak signifikan bagi naik turunnya daya saing. Rincian kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ancaman Masuknya Pendatang Baru

Pendatang baru biasanya akan menawarkan keunggulan produk atau jasa dibandingkan pemain lama. Adanya pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru dan keinginan untuk merebut bagian pasar (*market share*). Hal ini mengakibatkan harga turun atau biaya membengkak yang akhirnya mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan lama. Besar ancaman masuknya pendatang baru tergantung pada hambatan masuk yang ada dan reaksi dari peserta persaingan yang ada menurut perkiraan calon pendatang baru. Salah satu strategi perusahaan lama dalam menghadapi ancaman pendatang baru adalah melakukan penciptaan inovasi. Upaya inovasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing daerah.

2. Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok

Aspek yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri adalah jika terdapat sejumlah besar pemasok atau hanya terdapat sedikit bahan mentah substitusi, atau ketika biaya peralihan ke bahan mentah lain sangat tinggi. Kondisi tersebut menjadikan pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar menawarnya atas para pelaku usaha (perusahaan) dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dijualnya. Salah satu strategi perusahaan dalam menghadapi kekuatan tawar menawar pemasok adalah dengan melakukan strategi kemitraan atau perluasan jaringan pemasok alternatif.

3. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli

Pembeli bersaing dengan industri dengan memaksa harga turun, tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing (Cetindamar & Kilitcioglu, 2013). Pembeli atau pelanggan juga dapat bersaing dalam industri dengan cara menekan harga, menuntut kualitas yang lebih baik/tinggi atau layanan yang lebih memuaskan serta dapat berperan sebagai pesaing satu sama lain, yang mana semua ini dapat menurunkan laba industri. Salah satu strategi perusahaan dalam menghadapi kekuatan tawar menawar pembeli adalah dengan melakukan peningkatan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.

4. Ancaman Produk Substitusi

Dengan menetapkan batas harga tertinggi (*ceiling price*), produk atau jasa substitusi akan membatasi potensi suatu industri (Hosseini *et al.*, 2018). Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, maka semakin ketat pembatasan laba industri. Produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga maksimum yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri (Ocampo *et al.*, 2017).

5. Persaingan dalam Industri

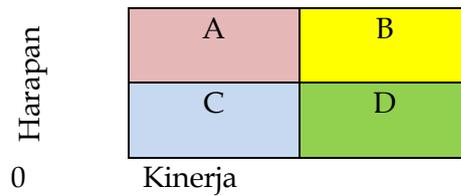
Persaingan antar perusahaan merupakan persoalan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan aspek lainnya. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika mampu memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan pesaing. Keunggulan tersebut biasanya terdiri dari aspek harga yang lebih kompetitif, kualitas yang lebih tinggi, fitur yang lebih beragam, dan strategi promosi yang lebih efektif. Biaya tetap (*fixed cost*) yang tinggi akan menciptakan tekanan yang berat terhadap semua perusahaan untuk mengisi semua kapasitas yang sering kali menyebabkan penurunan harga yang cepat pada saat terjadi kapasitas berlebih.

4. Metode Penelitian

Menurut Tobin & Begley (2003), pemilihan suatu jenis penelitian harus didasarkan pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual aspek penentu penguat daya saing daerah, yang mengambil kasus pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang dinilai paling representatif adalah pendekatan deskriptif dan *literature review*, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk membangun kerangka konseptual sebagai fondasi untuk mengkonstruksi indikator penentu daya saing daerah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis eksploratif deskriptif.

Dalam penelitian ini, pendekatan eksploratif deskriptif bertujuan untuk menghasilkan indikator penentu daya saing yang bukan hanya berkontribusi pada ranah kebijakan, namun juga teoritis. Dalam rangka pendalaman analisa, penelitian ini menekankan eksplorasi berdasarkan konfirmasi kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dan studi literatur. Anggota FGD adalah para pemangku kepentingan di wilayah daerah Kabupaten Jombang, dan kemudian hasil FGD akan diperdalam melalui penajaman *literature review*.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penajaman narasi dan melalui kuadran IPA (*Importance Performance Analysis*), yaitu memetakan aspek dan indikator apa saja yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan model ini, maka aspek penting dan indikator apa saja yang perlu mendapat perhatian (diprioritaskan) akan terpetakan dengan empat kuadran. Setiap kuadran memiliki makna yang berbeda kaitannya dengan bagaimana alokasi sumber daya daerah untuk memenuhi tingkat tata kelola yang diharapkan. Langkah untuk melakukan analisis IPA dalam penelitian ini adalah: (i) menentukan rata-rata kinerja tiap aspek dan indikator; (ii) menentukan rata-rata harapan tiap aspek dan indikator; (iii) menentukan *grand* rata-rata (rata-rata dari seluruh rata-rata aspek dan indikator) baik untuk kinerja maupun harapan; dan (iv) menentukan posisi koordinat masing masing item pada Diagram Kartesius empat kuadran sebagai berikut:



5. Hasil Pembahasan

a. Aspek Pembentuk Daya Saing Daerah

Berdasarkan hasil kegiatan lapangan, maka dapat ditarik beberapa temuan penting terkait beragam indikator pembentuk daya saing daerah. Indikator tersebut didasarkan hasil pembahasan berbasis FGD yang mengacu pada rumusan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan FGD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memahami faktor-faktor pembentuk daya saing daerah dari beragam aspek dan dimensi, dan juga dari level daerah hingga level desa. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain: (i) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang; (ii) pelaku UMKM yang aktif dalam kluster industri; (iii) perguruan tinggi lokal yang memahami karakteristik sumberdaya *endowment* di Kabupaten Jombang; dan (iv) pemerintahan kecamatan dan desa.

Berdasarkan hasil pembahasan saat dilakukan FGD, dan juga mengacu pada rumusan IDSD dari BRIN, dapat ditemukan empat usulan aspek pembentuk daya saing daerah, yaitu: (i) aspek penguat; (ii) aspek sumberdaya manusia; (iii) aspek pasar; dan (iv) aspek ekosistem inovasi. Penjelasan dari keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Penguat (*Enabling Environment*)

Aspek Penguat adalah beragam aspek yang berkaitan dengan kelembagaan dan faktor penguat lain pembentuk daya saing suatu daerah. Aspek Penguat tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) pilar kelembagaan; (ii) pilar infrastruktur; dan (iii) pilar perekonomian daerah. Pilar kelembagaan adalah aspek aturan main atau tata kelola dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maupun bagi pelaku ekonomi swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat Siudek & Zawojcka (2014), bahwa kelembagaan yang menyangkut sektor swasta maupun publik sangat menentukan kinerja daya saing dari aspek regulasi dan keterjaminan aturan main suatu sistem perekonomian. Sementara pilar

infrastruktur sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa perkembangan perekonomian daerah yang efisien dan efektif tidak bisa dicapai jika tidak ditunjang dengan infrastruktur (Ocampo *et al.*, 2017). Sedangkan pilar perekonomian daerah mengacu pada pendapat Soebagiyo (2014), bahwa beragam indikator makro ekonomi harus dijaga kinerjanya oleh pemerintah daerah melalui pengaturan konstelasi beragam pelaku ekonomi. Kuatnya kinerja beragam indikator ekonomi daerah mencerminkan kuatnya fondasi dalam membangun daya saing daerah.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Aspek Sumber Daya Manusia adalah aspek yang mendukung daya saing suatu daerah berdasarkan kepemilikan sumberdaya manusia yang dimiliki. Aspek Sumber Daya Manusia terdiri dari dua pilar, yaitu: (i) pilar kesehatan; dan (ii) pilar pendidikan dan keterampilan. Pilar kesehatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui produktivitas dan umur panjang (Habanik *et al.*, 2015). Sementara pendidikan dan keterampilan sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan produksi dan produktivitas, serta untuk mendorong inovasi daerah (Mohsenzadeh & Ahmadian, 2016). Tanpa tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang memadai, daerah akan mengalami kesulitan dalam mempercepat inovasi, termasuk potensinya rendahnya tingkat produktivitas SDM dalam melakukan aktivitas ekonomi.

3. Aspek Pasar (*Market*)

Aspek Pasar adalah aspek yang mendukung daya saing suatu daerah berdasarkan kondisi pasar, baik dalam konteks produksi, kondisi ketenagakerjaan, dan akses keuangan. Aspek Pasar terdiri dari empat pilar, yaitu: (i) pilar efisiensi pasar produk; (ii) pilar ketenagakerjaan; (iii) pilar akses keuangan; dan (iv) pilar ukuran pasar. Pilar efisiensi pasar produk berkaitan dengan tingkat efisiensi pasar produk baik dari sisi produksi maupun rantai distribusi pasar. Menurut Cetindamar & Kilitcioglu (2013), tingkat efisiensi pasar produk akan menentukan tingkat keberhasilan pelaku industri suatu daerah, sehingga keberhasilan sektor industri akan menentukan tingkat daya saing daerah. Sementara pilar ketenagakerjaan berkaitan dengan rata-rata kualitas tenaga kerja yang menjadi penentu daya saing daerah

dari sisi potensi produksi dan produktivitas produk barang dan jasa. Sedangkan pilar akses keuangan sangat dibutuhkan khususnya bagi pelaku usaha untuk meningkatkan investasi, produksi, dan kebutuhan biaya pemasaran, yang semuanya menjadi indikator penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Terakhir adalah pilar ukuran pasar, yaitu seberapa tinggi kemampuan daya jangkau pemasaran para pelaku usaha dan kemampuan pasar suatu daerah dalam memediasi kebutuhan pasar dari para pelaku usaha.

4. Aspek Ekosistem Inovasi

Aspek ekosistem inovasi adalah beragam inovasi daerah yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, dimana inovasinya mencakup beragam bidang, sehingga mampu menjadi daya dorong pembentuk daya saing suatu daerah. Aspek Ekosistem Inovasi terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) pilar dinamika bisnis; (ii) pilar kapasitas inovasi; dan (iii) pilar kesiapan teknologi. Menurut Habanik *et al.*, (2015), pilar dinamika bisnis mencerminkan seberapa stabil kondisi perekonomian daerah mampu menciptakan stabilisasi di bidang usaha (bisnis), sehingga kondisi tersebut menjadi pendorong penguatan daya saing daerah. Pada pilar kapasitas inovasi, mencerminkan seberapa tinggi tingkat inovasi daerah yang akan menentukan derajat keberhasilan peningkatan inovasi di berbagai bidang. Sementara pada pilar kesiapan teknologi, mencerminkan seberapa tinggi kesiapan suatu daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat disruptif, disamping kemampuan daerah dalam menghasilkan teknologi bagi kepentingan pembangunan.

Gambar 01. Komponen Pembentuk Daya Saing Daerah

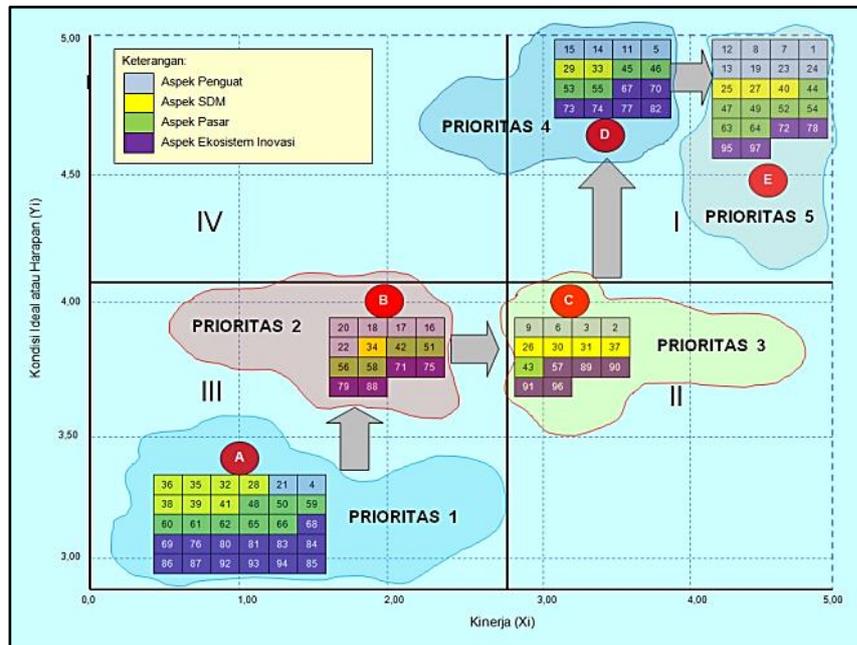


Sumber: BRIN, 2021

b. Kondisi Daya Saing Daerah di Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil FGD dan pengolahan data empat aspek penentu daya saing daerah beserta pilar pembentuknya (Gambar 01), maka dapat disusun hasil pemetaan kuadran dengan menggunakan model IPA (*Importance Performance Analysis*). Metode IPA didapat dari hasil penyusunan skor masing-masing indikator (total 97 indikator) pada keempat aspek pembentuk daya saing daerah. Sumbu horizontal (sumbu X) mencerminkan kinerja masing-masing indikator (skor existing). Sementara pada sumbu vertikal (sumbu Y) mencerminkan kondisi ideal atau harapan yang seharusnya dimiliki masing-masing indikator. Skor kondisi ideal dan harapan didapat melalui penyebaran kuesioner pada saat kegiatan FGD. Berdasarkan hasil analisa kuesioner, maka hasil pengolahan IPA dari 97 indikator penentu daya saing daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Gambar 02. Analisa IPA dalam Memetakan Prioritas Kebijakan Daya Saing Daerah Kabupaten Jombang



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Makna dari masing-masing empat kuadran dalam analisa IPA di atas adalah sebagai berikut:

1. Kuadran I (Pertahankan Prestasi dan Lakukan Sedikit Pengembangan), yaitu beragam indikator pembentuk masing-masing aspek yang masuk dalam Kuadran 1. Berdasarkan hasil IPA, indikator yang relatif paling mendominasi (jumlah indikator terbanyak) dalam kuadran ini adalah indikator pembentuk aspek penguat, sehingga aspek penguat selama ini adalah jenis aspek yang relatif berkinerja paling baik sebagai penentu daya saing daerah di Kabupaten Jombang.
2. Kuadran II (Perlu Banyak Pengembangan), yaitu kumpulan indikator-indikator pembentuk masing-masing aspek yang berkinerja "Cukup". Berdasarkan hasil IPA, indikator yang relatif paling mendominasi (jumlah indikator terbanyak) dalam kuadran ini adalah indikator pembentuk aspek ekosistem inovasi.
3. Kuadran III (Perlu Perbaikan yang Signifikan), yaitu kumpulan indikator-indikator pembentuk masing-masing aspek yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: (i) indikator yang

berkinerja “Rendah”; dan (ii) indikator yang berkinerja “Sangat Rendah”. Berdasarkan hasil IPA, indikator yang relatif paling mendominasi (jumlah indikator terbanyak) dalam kuadran ini adalah indikator pembentuk aspek ekosistem inovasi.

4. Kuadran IV (Perlu Perbaikan), yaitu kumpulan indikator-indikator yang berkinerja “Rendah” dan “Sangat Rendah” namun dengan kondisi ideal atau harapan yang disematkan sangat tinggi. Berdasarkan hasil IPA, tidak ada indikator pada masing-masing aspek yang masuk dalam kuadran ini.

Hasil di atas secara umum menegaskan bahwa aspek yang relatif berkinerja baik sebagai penentu daya saing daerah di Kabupaten Jombang adalah aspek penguat (Kuadran I), yang terdiri dari tiga pilar, yaitu kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Hasil ini memperkuat hasil penelitian Hosseini *et al.*, (2018), bahwa ekosistem kelembagaan sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pengaruhnya terhadap pengembangan kinerja ekonomi. Contohnya, pembuatan regulasi yang tepat sasaran akan menentukan tingkat keberhasilan akselerasi daya saing daerah. Selain itu, juga terdapat pilar infrastruktur yang akan menentukan kualitas perekonomian, contohnya seperti pembangunan sarana prasarana transportasi yang akan memperkuat efisiensi biaya transaksi dalam intensitas kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian Onyiengo (2014) juga menemukan bahwa kelembagaan yang direpresentasikan dengan penyusunan regulasi yang pro terhadap investasi menjadi sinyal positif bagi pelaku ekonomi untuk terus menanamkan investasinya dalam suatu daerah, dan implikasinya dapat dirasakan dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif. Sementara itu, Falkheimer & Heide (2014) menjelaskan bahwa infrastruktur sebagai bagian dari aspek penguat telah berperan penting dalam mewujudkan daya saing kompetitif suatu daerah. Daya saing kompetitif dapat diwujudkan dari efektivitas mobilitas perekonomian yang ditunjang dengan sarana prasarana transportasi yang memadai. Beragam hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa aspek penguat yang terdiri dari pilar kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun regulasi untuk meningkatkan daya saing daerah.

6. Penutup

Hasil penelitian ini yang didasarkan pada kegiatan FGD telah menyepakati bahwa aspek penentu daya saing daerah sangat ditentukan oleh empat aspek, yaitu aspek penguat, aspek SDM, aspek pasar, dan aspek ekosistem inovasi. Aspek penguat terdiri dari tiga pilar, yaitu kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Aspek SDM terdiri dari dua pilar, yaitu kesehatan dan pendidikan keterampilan. Sementara aspek pasar terdiri dari empat pilar, yaitu efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, dan ukuran pasar. Sedangkan aspek ekosistem inovasi terdiri dari tiga pilar, yaitu dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dan kesiapan teknologi. Kasus di Kabupaten Jombang menemukan bahwa aspek yang sangat menentukan daya saing daerah adalah disumbang dari aspek penguat. Tentu saja, hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh daerah, karena masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hanya saja, penelitian ini mempunyai kontribusi penting bahwa aspek-aspek penentu daya saing daerah dapat menjadi pedoman dalam menilai daya saing suatu daerah. Keempat aspek yang ditetapkan dapat menjadi dasar kerangka konseptual dalam menyusun penilaian terhadap daya saing daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2021. *Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah*. Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jakarta.
- Cetindamar, D; & Kilitcioglu, H. 2013. Measuring the competitiveness of a firm for an award system. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, Vol. 23, No. 1, pp. 07-22.
- Chikan, A. 2008. National and firm competitiveness: a general research model. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, Vol. 18, No. 1, pp. 20-28.
- Falkheimer, J., & Heide, M. 2014. From public relations to strategic communication in sweden. *Nordicom Review*, Vol. 35, No. 2, pp. 123-138.
- Habanik, J; Kordos, M; & Hostak, P. 2015. Competitiveness of slovak economy and regional development policies. *Journal of International Studies*, Vol. 9, No. 1, pp. 144-155.
- Hosseini, A; Soltani, S; & Mehdizadeh, M. 2018. Competitive advantage

- and its impact on new product development strategy (case study: toos nirro technical firm). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol. 4, No. 17, pp. 01-12.
- Mohsenzadeh, M; & Ahmadian, S. 2016. The mediating role of competitive strategies in the effect of firm competencies and export performance. *Economics and Finance*, Vol. 36, pp. 456-466.
- Ocampo, J.R; Matias, J.C; & Vizan, A. 2017. Method for estimating manufacturing competitiveness: the case of the apparel maquiladora industry in central america. *DYNA*, Vol. 84, pp. 97-106.
- Onyiengo, S.I. 2014. Effectiveness of communication media used by the public relations department in facilitating effective internal public relations at the kerio valley development authority in kenya. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4, No. 9, pp. 23-35.
- Remitasari, A., & Fenton, A.J. 2021. Public perception on the implementation of tax amnesty program. *Journal of Communication & Public Relations*, Vol. 1, No. 1, pp. 45-57.
- Rivero, O., & Theodore, J. 2014. The importance of public relations in corporate sustainability. *Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce*, Vol. 14, No. 4, pp. 14-25.
- Siudek, Tomasz; & Zawojka, Aldona. 2014. Competitiveness in the economic concepts, tehories and empirical research. *Oeconomia*, Vol. 13, No. 1, pp. 91-108.
- Soebagiyo, D. 2014. Implications and competitiveness of regions on regional development of central java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, pp. 158-171.
- Sundgren, B. 2015. What is a public information system?. *International Journal of Public Information Systems*, Vol. 1, No. 2, pp. 81-92.
- Tobin, G.A., & Begley, C.M. (2003). Methodological Rogour Within a Qualitative Framework. *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 48, No. 4, pp. 388-396.
- Yushkov, A. 2015. Fiscal decentralization and regional economic growth: theory, empirics, and the russian experience. *Russian Journal of Economics*, Vol. 1, pp. 404-418.